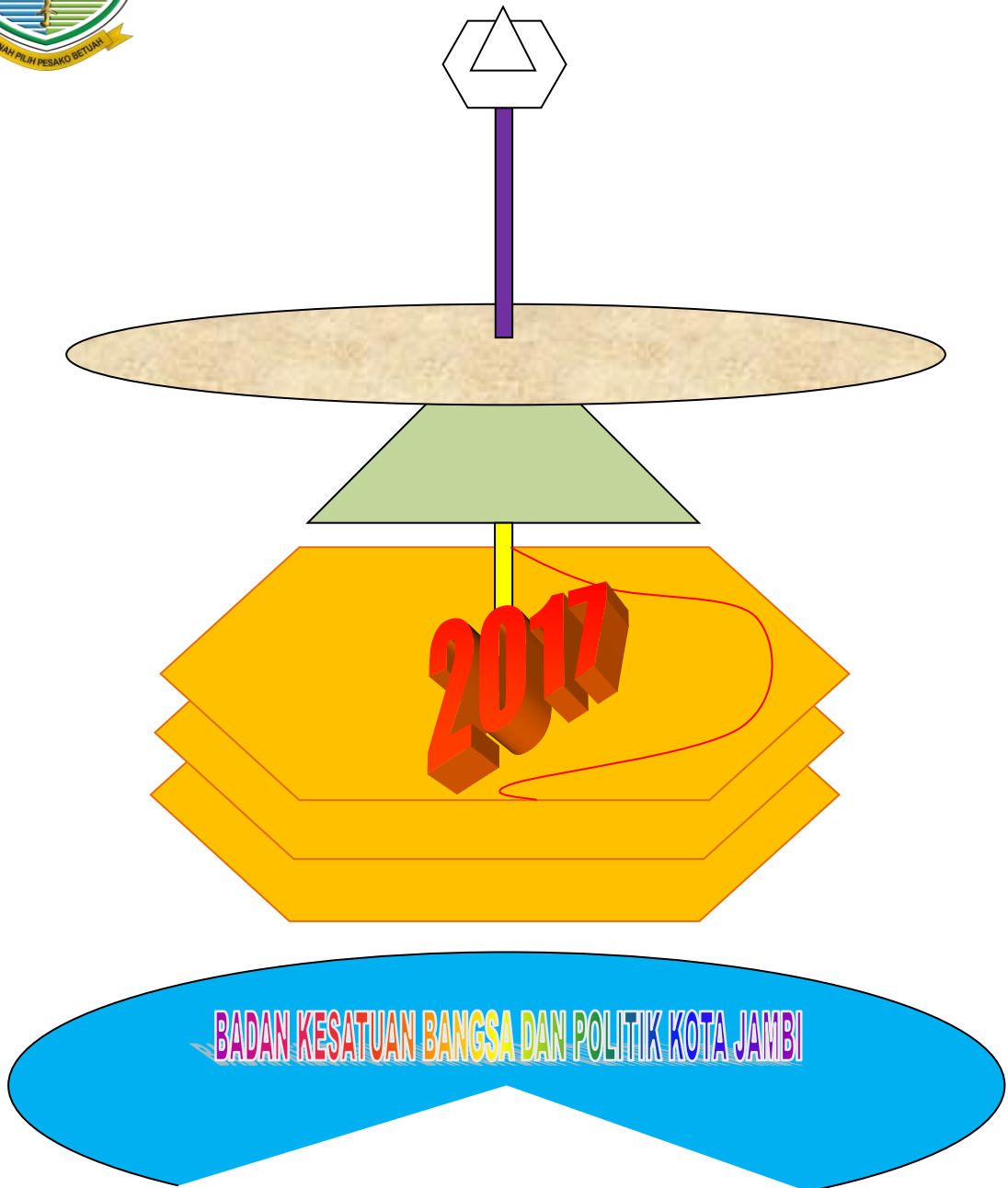


LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA JAMBI
TAHUN 2017





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Jambi, dapat Menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



Dokumen LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini disusun sebagai wujud tanggung jawab atas kinerja dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2017, dimana penilaian kinerja disajikan secara kuantitatif. LKj ini berfungsi sebagai transparansi kepada masyarakat dan sebagai alat kendali peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja berdampak pada peningkatan Pembangunan Daerah khususnya Kota Jambi seiring dengan perjalanan reformasi akan selalu menghendaki pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, demokratis, bertanggung jawab serta transparan dan responsif. Untuk itu instansi pemerintah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

Jambi harus bekerja berdasarkan *Visi dan Misi* yang jelas, menggunakan strategi yang tepat serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang tepat pula.

Pada LKj Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menetapkan 4 indikator. Secara umum target kinerja tercapai, namun ada beberapa target yang tidak tercapai, hal ini disebabkan BKBP bersifat mengkoordinir dan fasilitasi baik instansi atau organisasi.

Setelah dianalisis dan di evaluasi semoga LKj merupakan gambaran dan menjadi acuan budaya kinerja di lingkungan BKBP. Untuk mendukung dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan mewujudkan Kota Jambi Bangkit.

Diharapkan dengan tersusunnya LKj ini dapat dijadikan alat pembandingan dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk tahun mendatang dengan lebih baik lagi. Namun demikian Kami menyadari bahwa penyusunan ini jauh dari suatu kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan demi suatu perbaikan yang terus menerus.

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA JAMBI**

LIPHAN PASARIBU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590912 198002 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Gambaran Umum 1

 1.2. Tugas dan Fungsi 4

 1.3. Isu Strategis 4

 1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

 2.1. Rencana Strategis 10

 2.2. Indikator Kinerja Utama 13

 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

 3.1. Capaian Indikator Kinerja 15

 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 16

 3.3. Akuntabilitas Keuangan 39

 3.4. Hasil Rivew 40

BAB IV PENUTUP 42

Lampiran

 Rencana Aksi 2017

 Rencana Aksi 2018

 Indikator Kinerja Utama (IKU)

 Lain lain



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) dan dirubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, susunan organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah, membawahi
 - a. Sub Bidang Politik
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Daerah
5. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama
 - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

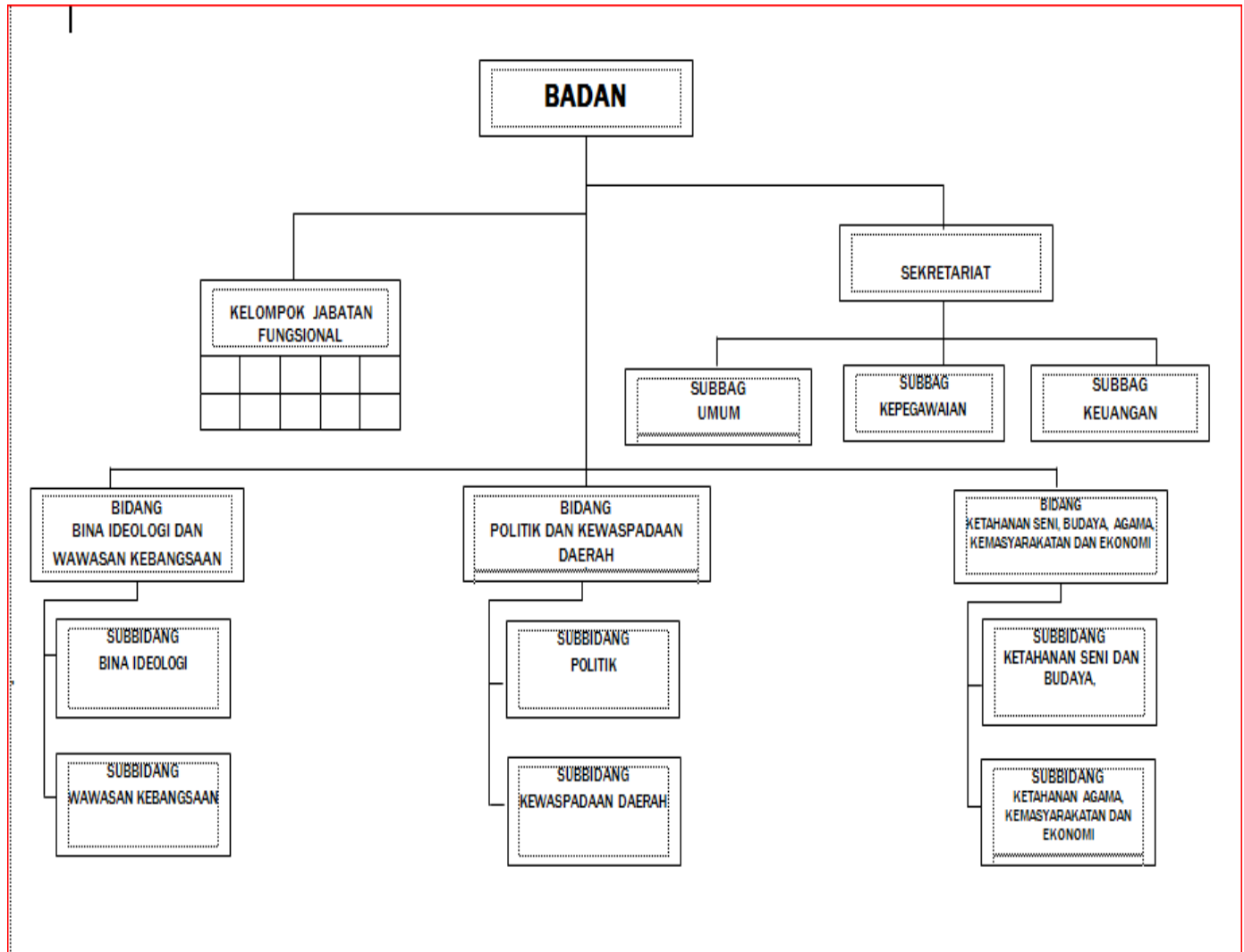
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dilihat

dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Jambi





1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksaaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
- e. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Isu Strategis

Sesuai dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Ormas



dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ormas juga dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan social, juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dapat dijatuhkan sanksi pidana/hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Tahun 2017 tercatat ada beberapa organisasi yang diterima dan disetujui untuk diterbitkan izin SKT (Surat Keterangan Terdaftar) nya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, sebagian lagi bersedia melakukan pendaftaran ulang Organisasinya ke Mendagri RI melalui Badan Kesbangpol Kota Jambi. Peran Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam memberikan pembinaan dan penertiban terhadap seluruh Ormas yang terdaftar sangatlah penting, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Seperti diketahui belum lama ini pemerintah telah membubarkan ormas yang dipandang telah melanggar nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Pembubaran Ormas ini dilakukan karena telah melakukan berbagai tindakan radikalisme, intoleransi, dan anti kebhinekaan yang tidak hanya bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tetapi juga telah membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.



Perrmasalahan keagamaan secara nasional adalah konflik Rohingya . Masalah Rohingya ini setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi yaitu sejarah, ekonomi, politik dan Agama. Jadi kita harapkan konflik ini tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu perlu penjelasan para pemimpin agama dan para ulama untuk memberi penjelasan sehingga tidak terjadi salah penafsiran, tidak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan. Peran Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam hal ini FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) menjadi sangat penting.

Persoalan keagaman di Kota Jambi tidak terdapat permasalahan yang berarti yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang ada hanya permasalahan pendirian rumah ibadah dan dalam hal ini telah diambil langkah-langkah konkrit agar masalah yang timbul tidak berdampak luas di masyarakat. Selama tahun 2017 dalam penyelesaian pendirian rumah ibadah pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan bersedia memfasilitasi sepenuhnya pengurusan pembuatan IMB bagi rumah ibadah yang berdiri sebelum Tahun 2006 dan pengurus rumah ibadah bersedia memenuhi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mendapatkan IMB.

Kondisi lingkungan masyarakat saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena pengaruh dampak negatif dari perkembangan kemajuan jaman baik dari ilmu dan teknologi yang dapat menyebabkan perubahan pola perilaku dan akhlak. Perubahan pola pikir dan akhlak yang sangat mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang kurang baik serta menurunkan rasa cinta tanah air. Saat ini sosialisasi



sudah banyak dilakukan baik tentang Pembauran Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan dan sosialisasi yang bersifat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai NKRI.

Moral dan akhlak generasi muda saat ini cenderung semakin menurun, hal ini dapat mempermudah masuknya pengaruh paham-paham radikal atau ideologi asing dan aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan kaidah dan norma agama. Generasi muda perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tidak terjebak dalam paham radikal bebas seperti yang pernah ada dalam Kota Jambi. Ada beberapa warga Jambi menjadi teroris Hal ini tentu sangat bertentangan dengan kaidah dan norma agama. Maka dari itu perlu adanya pembekalan bagi generasi muda berupa sosialisasi pendidikan yang berwawasan kebangsaan yang berdasar pada empat pilar kehidupan berbangsa yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius adalah semakin maraknya peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi saat ini yang dapat membawa dampak buruk bagi generasi muda. Maka oleh sebab itu perlu di adakan tes urine untuk mengantisipasi kecanduan narkoba dan meminimalisir perkembangan narkoba. Untuk tahun depan Badan Kesbangpol Kota Jambi akan tetap melanjutkan kegiatan ini berupa sosialisasi dan tes urine kepada generasi muda terutama di kalangan pelajar.



Badan Kesbangpol Kota Jambi memiliki kewenangan mendukung terwujudnya stabilitas keamanan didaerah, dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik sosial. Menyikapi peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa Kunjungan, perlu dilakukan pemantauan terhadap keberadaan orang asing untuk mengantisipasi dan mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan

Gagalnya lelang e-KTP secara nasional menjadi salah satu permasalahan pemilu di Kota Jambi karena syarat untuk menjadi pemilih pemula harus sudah memiliki e-KTP sementara masyarakat di Kota Jambi belum 100% memiliki e-KTP. Adapun masalah lainnya adalah masyarakat perbatasan antara Kota Jambi dan Muara Jambi, masyarakat yang tinggal di Kota Jambi menggunakan KK dan KTP Muara Jambi dan sebaliknya, hal ini memerlukan survei untuk memastikan mata pilih dalam pemilu di Kota Jambi serta kurangnya pemahaman pemilih pemula terhadap pentingnya pemilu menyebabkan turunnya tingkat partisipasi politik di Kota Jambi. Sosialisasi Pemilih pemula akan tetap dilanjutkan di tahun berikutnya mengingat tahun 2018 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, maka hal ini dirasa sangat penting agar para pemilih pemula dapat lebih memahami arti pentingnya pemilu dan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tugas dan Fungsi, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian indikator kinerja Utama (IKU); pengukuran, evaluasi dan analisis sasaran; akuntabilitas kinerja dan prestasi.

BAB IV Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pada RPJMD 2013-2018 Kota Jambi menetapkan visi dan lima misi dengan enam prioritas, dan Badan Kesbangpol Kota Jambi mengemban salah satu amanat dari 1 misi, yaitu:

Misi 5 : *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Dalam Bingkai Kearifan Lokal*, dengan prioritas 2, dimana salah satu sasaran didalamnya adalah Terwujudnya Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama.

Untuk mendukung misi tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menetapkan Rencana Strategis, sebagai berikut:

Visi : **“*TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT KOTA JAMBI MELALUI STABILITAS POLITIK DAN PEMBINAAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK*”**.

Ini mengandung makna mewujudkan makin kokoh dan kuatnya rasa persatuan dan kesatuann bangsa, khususnya di Wilayah Kota Jambi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan secara transparan dan akuntabilitas serta terciptanya stabilitas politik yang kondusif dalam Kota Jambi.

Sejalan dengan Visi tersebut diatas, maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, adalah :



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

1. Meningkatkan rasa aman, tertib dan berbudaya dalam masyarakat.
2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pendidikan politik, pemberdayaan Ormas dan Parpol dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
4. Meningkatkan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
5. Meningkatkan rasa cinta tanah air pada masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Jambi
Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	Peran Orkemas dan Parpol dalam pembangunan daerah dan demokrasi

Tabel 2.1.1.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEADAA N 2015	SATUA N	TARGET	
						2016	2017
1.Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan masalah keagamaan	1.Terselesaikannya masalah agama	1.Persentase penyelesaian masalah keagamaan	100	%	100	100
2.Meningkatkan persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Persentase penurunan angka konflik	2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan/etnis	2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	100	%	100	100
3.Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui Orkemas	3. Meningkatnya organisasai kemasyarakatan yang aktif	3.Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	5	%	5	5
4.Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase penurunan jumlah gangguan keamanan/ketertiban masyarakat	4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah	4. Kondisi daerah yang kondusif	100	%	100	100

Tabel 2.1.2.

Untuk melaksanakan rencana strategis, Badan Kesbangpol memiliki program dan anggaran pada tahun 2017 sebagai berikut:



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

1. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol:
Rp.220.696.000
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan:
Rp.1.487.098.500
3. Program Non Urusan:
Rp.1.027.205.500

2.2. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100
2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	%	100
3. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	5
4. Kondisi daerah yang kondusif	%	100

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. terselesaikannya masalah keagamaan	1. Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100
2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar	2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras	%	100



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

golongan/etnis	dan antar golongan/etnis		
3. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	3.Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	5
4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah	4. Kondisi daerah yang kondusif	%	100

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Capaian Indikator Kinerja**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terselesaikannya masalah keagamaan	1. Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100	100	100
2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	%	100	100	100
3. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	3. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	5	10,4	208
4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah	4. Kondisi daerah yang kondusif	%	100	100	100

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. terselesaikannya masalah keagamaan

Ada beberapa kegiatan terkait dengan masalah keagamaan, agar kinerja Badan Kesbangpol dapat dicapai, antara lain:

- a. Adanya Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan Nomor 8.

Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jambi sampai tahun 2017 ini sudah mengadakan kegiatan Pembinaan Umat Beragama di Kota Jambi yang berupa Dialog Antar Umat Beragama pada Tanggal 27 April 2017

Dari Kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah dan FKUB Kota Jambi bisa memberikan pemaparan secara langsung kepada Camat, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. setempat yang bertujuan untuk mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan beragama.



Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jambi sudah 10 kali turun ke lapangan untuk Peninjauan Rumah Ibadah,



masalah perizinan Rumah Ibadah khususnya untuk Rumah Ibadah yang berdiri sebelum tahun 2006 ataupun permasalahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Di antaranya :

1. 10 Rumah Ibadah di Wilayah Pasar Jambi
2. 11 Rumah Ibadah di Wilayah Jambi Timur
3. 10 Rumah Ibadah di Wilayah Jambi Selatan
4. 1 Rumah Ibadah di Wilayah Danau Sipin
5. 15 Rumah Ibadah di Wilayah Telanaipura
6. 2 Rumah Ibadah di Wilayah Kota Baru
7. 1 Rumah Ibadah di Wilayah Jelutung
8. 3 Rumah Ibadah di Wilayah Alam Barajo
9. 2 Rumah Ibadah di Wilayah Paal Merah
10. 1 Rumah Ibadah di Wilayah Danau Teluk

Dari Hasil Peninjauan ke lapangan oleh Tim FKUB, lalu diadakan Rapat Koordinansi oleh Dewan Penasehat FKUB dan Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jambi membahas Perizinan Mendirikan Rumah Ibadah dan beberapa masalah keagamaan sebanyak 12 kali bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yaitu pada :

1. Tanggal 11 Januari 2017
2. Tanggal 19 Januari 2017
3. Tanggal 26 Januari 2017
4. Tanggal 21 Maret 2017
5. Tanggal 15 Mei 2017



6. Tanggal 19 Mei 2017
7. Tanggal 22 dan 29 Mei 2017
8. Tanggal 24 Agustus 2017
9. Tanggal 07 September 2017
10. Tanggal 20 September 2017
11. Tanggal 17 November 2017
12. Tanggal 08 dan 13 Desember 2017

Dari hasil rapat antara Dewan FKUB dan Tim FKUB perihal menindaklanjuti dari Peninjauan Lapangan Rumah Ibadah telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai berikut :

- 45 untuk Masjid dan Langgar
- 4 untuk Gereja
- 1 untuk Klenteng

Tahun 2017 terdapat masalah agama yang berjumlah 6 dan ke 6 masalah tersebut dapat diselesaikan, permasalahan keagamaan ini sebagian besar hanya terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah. Masalah pendirian rumah ibadah ini sebagian telah berlangsung lama, namun tahap demi tahap penyelesaian masalah tersebut dapat terselesaikan dengan solusi yang dapat membuat permasalahan ini dapat dikatakan tidak terlalu berdampak yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang terlihat dalam table setiap tahun permasalahan keagamaan dapat terselesaikan dengan baik.



TAHUN	JUMLAH MASALAH	JUMLAH MASALAH YANG SELESAI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2014	1	1	100	n/a
2015	3	3	100	n/a
2016	6	6	100	n/a
2017	1	1	100	n/a

Dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), merupakan forum yang beranggotakan dari beberapa unsur agama, antara lain: agama Islam, Kristen, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan.

b. Adanya Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Tim PAKEM terbentuk berdasarkan:

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
2. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Kep-64/N.5/Dsp.5.10/05/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Jambi.

Tim PAKEM Kota Jambi sampai dengan tahun 2017 ini sudah mengadakan 4 kali rapat, dari hasil rapat dihimpun data Aliran Kepercayaan Masyarakat yang ada didalam Wilayah Kota Jambi sebanyak 16 data aliran kepercayaan. Di antara aliran yang

berkembang ditemukan aliran Jema'at Ahmadiyah yang meresahkan masyarakat dilingkungan sekitar. Dari hasil rapat tersebut Jema,at Ahmadiyah bersedia menghentikan sejenak Pembangunan Rumah Ibadahnya sampai melengkapi semua persyaratan dan bersedia kembali berdialog tertutup dengan Pemerintah dan Pihak MUI.

Sasaran 2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis

Sepanjang tahun 2017 hampir tidak ditemukan di Kota Jambi konflik di masyarakat baik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya, walaupun ada yang tidak terpantau oleh Badan Kesbangpol kemungkinan tidak sampai menimbulkan kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi selama tahun 2017 di Kota Jambi sangatlah kondusif. Jadi dapat dikatakan bahwa angka konflik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya tidak terdapat di Kota Jambi di tahun 2017.

TAHUN	JUMLAH KONFLIK	JUMLAH KONFLIK YANG DIATASI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2015	0	0	100	n/a
2016	0	0	100	n/a
2017	0	0	100	n/a

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan diberikan Tugas dan Tanggung Jawab melaksanakan **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

Dari program tersebut Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan sebagian kegiatan antara lain :

- A. Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, kegiatan ini dilaksanakan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan.
 2. Kegiatan Rapat/Koordinasi Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan.
 3. Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa (Nation Character Building/NCB).
 4. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 5. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
- B. Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
1. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi :

1.1. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 12 sekolah menengah pertama baik sekolah negeri maupun swasta dalam Kota Jambi. Sosialisasi yang diberikan berisi materi tentang akhlak, narkoba, wawasan kebangsaan dan bela Negara, Pancasila dan budi pekerti dengan harapan kegiatan ini dapat menimbulkan rasa cinta tanah air atas NKRI dan Pancasila yang dilandasi pada akhlak dan budi pekerti yang baik/yang terbebas dari narkoba.

1.2. Kegiatan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan.

Kegiatan sosialisasi Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi Tahun 2017, ditujukan untuk meningkatkan pembinaan pada masyarakat agar dapat hidup rukun dan damai serta penuh rasa toleransi guna tercapainya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang berbeda suku/etnis, ras, sosial budaya dan agama.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret bertempat di balai diklat lebak bandung Kota Jambi dibuka oleh Asisten III Setda Kota Jambi yang dihadiri sebanyak 127 orang peserta masing-masing utusan Kecamatan Kota Baru sebanyak 71 orang dan Alam Barajo sebanyak 56 orang utusan dari etnis/suku, dan ras diwilayah Kecamatan yang bersangkutan.

1.3. Kegiatan Rapat Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Tim Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi.

Rapat Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Se-Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 8 Februari 2017 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi rapat Evaluasi Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi membahas tentang rencana kerja Pengurus Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jambi Periode 2017-2020.



- b. Pada tanggal 6 Maret 2017 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi rapat Evaluasi Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Tim Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi, melanjutkan pembahasan tentang rencana kerja Pengurus Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jambi Periode 2017-2020.
- c. Pada tanggal 20 Maret 2017 rapat panitia kegiatan sosialisasi Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi, membahas tentang persiapan yang diperlukan dan tugas-tugas panitia dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
- d. Pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi rapat Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jambi, membahas tentang persiapan kegiatan Silaturahmi Kebhinnekaan dan Halalbihalal antar etnis/suku dengan Bapak Walikota Jambi.
- e. Pada tanggal 4 Juli 2017 Rapat Koordinasi Pengurus Dewan Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Tim Forum Pembauran Kebangsaan, materi pembahasan tentang pemantapan acara silaturahmi halalbihalal antar etnis/suku dengan Bapak Walikota Jambi.
- f. Pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi, rapat Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran

Kebangsaan Kota Jambi, membahas tentang keikutsertaan dalam kegiatan Karnaval Angso Duo.

- g. Pada tanggal 29 November 2017 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi, rapat Pengurus Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jambi, melanjutkan pembahasan tentang keikutsertaan dalam kegiatan Karnaval Angso Duo.

1.4. Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa (Nation Character Building) Tingkat Kota Jambi Tahun 2017.

Keluaran (output) kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Aparatur untuk menjadi pribadi yang berkarakter mulia, disiplin, tahan uji, jujur, inisiatif, penundukan diri, kooperatif, tekun dan berani sebagai landasan utama menjadi aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan Dandim 0415 Batanghari dalam meningkatkan Nation Character Building. Sementara hasil yang diharapkan (out come) adalah meningkatkan kesadaran dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan membentuk pemimpin yang berkarakter, bernilai luhur Pancasila dan berwawasan kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut kegiatan, materi dan hasil yang diperoleh adalah :

- a. Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa (Nation Character Building) dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2017 yang dibuka oleh Bapak Asisten II Setda Kota Jambi, peserta sebanyak 80 orang,



terdiri dari : Utusan dari Pimpinan Parpol DPRD, Sekretaris Lurah, Kepala Sekolah Menengah Pertama.

b. Materi yang disampaikan adalah :

1. Kepemimpinan berwawasan kebangsaan dengan Narasumber dari Dandim 0415 Batanghari.
2. Kepemimpinan yang Pancasila dengan Narasumber Kapolresta Jambi.
3. Kepemimpinan yang menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan Narasumber Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi.
4. Pemimpin yang bersih dari Narkoba dengan Narasumber BNN Kota Jambi.
5. Solidaritas, Loyalitas dan Integritas ASN dengan Narasumber Kepala BKPSDMD Kota Jambi.
6. Membangun Pemimpin Yang Berkarakter dan Nilai-nilai Luhur Kepemimpinan dengan Instruktur/Trainer dari Butterfly Center Bandung.

Kegiatan ini dinilai sangat memberikan motivasi bagi peserta untuk bekerja, berinovasi lebih baik dalam melaksanakan tugasnya yang dilandaskan pada Karakter Pancasila.

1.5. Kegiatan Rapat Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Jambi.

1. Rapat Pertama pada tanggal 2 Februari 2017 membahas tentang:

- a. Kegiatan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i Sekolah Menengah Pertama se-Kota Jambi
 - b. Memformulasi materi Wawasan Kebangsaan yang akan disampaikan oleh anggota Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Rapat Kedua pada tanggal 23 Februari 2017 membahas tentang :
- Pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan ke sekolah-sekolah Se-Kota Jambi.
 - Materi sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi Materi Pendidikan Akhlak, Pendidikan Pancasila, Bela Negara, Narkoba dan Pendidikan Budi Pekerti.
3. Rapat Ketiga pada tanggal 10 November 2017 membahas tentang :
- Jadwal turun sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan ke Sekolah Menengah Pertama.
 - Tata cara pelaksanaan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan.
4. Rapat Keempat pada tanggal 7 Desember 2017 membahas tentang:
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i Sekolah Menengah Pertama se-Kota Jambi.
 - Rencana kegiatan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang akan datang.



1.6. Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

1. Pada tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi dihadiri sebanyak 220 orang peserta terdiri dari :
 - a. Utusan Pemuda Masjid = 100 orang
 - b. Utusan Pemuda Gereja = 100 orang
 - c. Utusan Pemuda Majelis Budhayana = 10 orang
 - d. Utusan Pemuda Kong Khu Chu Jambi = 5 orang
 - e. Utusan Pemuda Umat Hindu (Peradah) = 5 orang
2. Kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan tema “Mari Kita Aktualisasikan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan”.
3. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Plt. Sekretaris Daerah Kota Jambi selaku Ketua Tim Pendidikan Wawasan kebangsaan Kota Jambi yang dihadiri oleh Narasumber dari Kemendagri yaitu Bapak Hartono selaku Kasubdit Karakter dan Wasbang Dirjen Kesbangpoldengan materi “Peran Generasi Muda dalam memahami Ideologi Pancasila dalam era globalisasi”.
4. Penyerapan materi yang disampaikan oleh Narasumber, terutama tentang pengamalan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mengimplementasikan Nilai-nilai Dasar Pancasila, agar tidak terpengaruh dengan Nilai-nilai dan Ideologi asing.

1.7. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

1. Rapat Pertama Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Tingkat Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017, membahas tentang :
 - Kesiapan Forum RT dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
 - Menjadikan Forum RT menjadi relawan Anti Narkoba (Duta Narkoba).
 - Tindakan Forum RT terhadap warganya yang terbukti menggunakan narkoba.
2. Rapat Kedua Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Tingkat Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017, membahas tentang :
 - Jadwal pelaksanaan Tes Urine.
 - Teknis pelaksanaan Tes Urine.

1.8. Tes Urine Narkoba

- a. Tanggal 30 Oktober 2017 bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda telah dilaksanakan tes urine bagi siswa/i SMP dalam Kota Jambi bertempat di Aula Kantor Satpol PP Kota Jambi.
- b. Peserta tes urine sebanyak 100 orang terdiri dari 9 SMP dalam Kota Jambi seperti yang tertera dibawah ini :



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

- SMP Negeri 1 Kota Jambi sebanyak	= 5 orang
- SMP Negeri 5 Kota Jambi sebanyak	= 7 orang
- SMP Negeri 7 Kota Jambi sebanyak	= 6 orang
- SMP Negeri 14 Kota Jambi sebanyak	= 35 orang
- SMP Negeri 15 Kota Jambi sebanyak	= 10 orang
- SMP Negeri 20 Kota Jambi sebanyak	= 9 orang
- SMP Negeri 21 Kota Jambi sebanyak	= 9 orang
- SMP Negeri 24 Kota Jambi sebanyak	= 9 orang
- SMP Negeri 25 Kota Jambi sebanyak	= 10 orang
<hr/>	
JUMLAH	= 100 orang

- c. Kegiatan tes urine melibatkan BNN Kota Jambi, Satpol PP dan Dinas Pendidikan Kota Jambi, dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan hasil dari tes urine terdapat beberapa siswa yang teridentifikasi menggunakan obat-obatan terlarang.
- d. Siswa-siswi yang terindikasi telah dilaporkan ke sekolah masing-masing dan pihak sekolah telah melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut.

Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kegiatan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA), diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2017 bertempat di Rumah Dinas Walikota Jambi dengan peserta 70 orang terdiri utusan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi

dan Instansi terkait dalam rangka menghadapi Perayaan Natal dan Perayaan Pergantian Tahun 2017 membahas tentang :

- Kesiapan Pemerintah Kota Jambi dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat pada saat Perayaan Natal dan Perayaan Pergantian Tahun 2017 ke 2018
- Menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama dalam menjalankan Ibadahnya
- Melaksanakan pemantauan kegiatan Ibadah Natal Tahun 2017 ke gereja-gereja dalam Kota Jambi



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dari Bidang politik dalam mencegah timbulnya konflik, antara lain:

a. Penanganan Konflik Sosial (PKS)

Tim Penanganan Konflik Sosial ini merupakan tim dari semua SKPD yang terkait membuat laporan Rencana Aksi dalam Kota Jambi yang disampaikan secara rutin 4 (empat) bulan satu kali, B 04, B 08 dan B 12 melalui Badan Kesbangpol Kota dan laporan tersebut langsung dilaporkan Ke Kesbangpol Provinsi. Dengan adanya tim ini diharapkan dapat mencegah dan menghentikan berkembangnya konflik dan potensi konflik di daerah, Badan

Kesbangpol Kota Jambi dalam hal ini memiliki kewenangan mendukung terwujudnya stabilitas keamanan di daerah dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik sosial. Dalam hal ini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 kali selama Tahun 2017. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terdatanya keberadaan Orang Asing di Kota Jambi dengan rinci sesuai dengan data statistic orang asing dan data pemetaan wilayah yang berhasil dihimpun dari Januari – Desember 2017.



b. Pengawasan Orang Asing

Kegiatan dengan cara mengimput data tenaga kerja Asing yang berhubungan dengan instansi terkait antara lain :

1. Imigrasi Jambi
2. Dinas Sosnaker
3. Capil
4. Dinas Pendidikan
5. Survey Pemantauan Orang Asing ke perusahaan yang memperkerjakan orang asing, dan tenaga kerja asing di antaranya ke PT. Universal Support, Stella Maris School Jambi, PT. Mahan

Indo Global, Unja Telanaipura, PT. Suber Agrindo Sejahtera, PT. Spicelix, PT. Sinar Amigo Pratama, Saksi-saksi Yehua Indonesia, PT. Bohai Drilling Service Indonesia dan Armeida Rizki, Kementrian Riset dan Teknologi Unja, UIN Jambi, PT. Lifeonic, General Tranding, PT. Sungai Bahar Pasific, PT. Sungai Bahar Pasific, PT. Minimex Indonesia dan PT. Triveni

6. Rapat pengawasan orang asing dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 April 2017, Jumat tanggal 27 Juni 2017 dan Selasa, Rabu tanggal 7-8 Agustus 2017 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi membahas koordinasi dan persiapan untuk melakukan pemantauan orang asing dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keberadaan orang asing dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keberadaan orang asing di Kota Jambi.



Kesimpulan Hasil Pemantauan Orang Asing bertujuan untuk mengetahui keberadaan orang asing di Kota Jambi dan menyesuaikan antara dokumen status keberadaan dan realisasi di lapangan kemudian memberikan pengarahan kepada pihak sponsor supaya melaksanakan tanggung jawabnya dalam

penggunaan tenaga kerja asing, mahasiswa asing, rohaniawan asing dan peneliti asing sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku

Keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing adalah tanggungjawab kita bersama sebagai abdi Negara dan masyarakat.

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)



Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2006 di 2 (dua) Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bertujuan untuk deteksi dini masyarakat agar dapat terdeteksinya gejala-gejala gangguan keamanan yang terjadi baik itu bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali. Rapat yang telah dilaksanakan membahas masalah keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam Kota Jambi, membahas isu dan informasi penting yang terjadi di Kota Jambi baik isu kamtibmas, isu bidang ekonomi, politik hankam dan social dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1438 Hijriah dan desakan wacana pembubaran ormas HTI di Kota Jambi.

Sasaran 3. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif

Badan Kesbangpol Kota Jambi menetapkan empat kriteria Organisasi Kemasyarakatan yang aktif, adapun kriteria tersebut sebagai wujud dalam mendukung program-program pemerintah. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang aktif, adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan;
2. Tersedianya Struktur Organisasi dan AD/ART;
3. Melaksanakan rapat rutin
4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi;
5. Melaksanakan kegiatan di masyarakat

Adapun jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif hanya 5 dan 48 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar. Ke 5 Organisasi Kemasyarakatan tersebut adalah:

1. Perkumpulan Sadar Jambi
2. LPKNI
3. OPSI
4. Ki Sumo
5. LSM HAM

Tabel jumlah organisasi kemasyarakatan

TAHUN	JUMLAH ORMAS TERDAFTAR	JUMLAH ORMAS AKTIF	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2014	164	1	0,6	n/a
2015	175	1	0,6	n/a



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

2016	182	3	1,6	n/a
2017	48	5	10,4	n/a

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana sesuai dengan Tupoksinya berperan untuk mendorong aktifnya organisasi kemasyarakatan, secara periodik atau continue, mengadakan:

- a. Sosialisasi Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan
- b. Silaturahmi dengan pengurus ormas
- c. Melakukan pembinaan-pembinaan melalui sosialisasi

Dari target yang ditetapkan yaitu 5%, realisasi 10,4 yang aktif. Hal ini disebabkan jumlah Ormas bertambah namun yang aktif hanya 5 Ormas. Organisasi Kemasyarakatan tersebut memiliki dana yang cukup karena sebagian besar memiliki kepengurusan tingkat nasional. Organisasi Kemasyarakatan yang tidak aktif bukan berarti sudah bubar atau tidak punya kegiatan, namun kegiatan mereka kurang mendukung terhadap program-program dan tidak melaporkan kegiatannya ke Badan Kesbangpol Kota Jambi. Hal ini sebetulnya bisa diantisipasi dengan cara monitoring ke Sekretariat Ormas nya langsung, namun Badan Kesbangpol khususnya bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi tidak dapat seluruhnya melakukannya.

Badan Kesbangpol Kota Jambi belum bisa mendapatkan pembanding. Baik di kabupaten/kota lain maupun ditingkat Provinsi Jawa Barat, karena kebanyakan SKPD Badan Kesbangpol di daerah hanya memiliki data organisasinya saja



Seni dan Budaya Daerah Kota Jambi semakin tergerus dengan kemajuan ilmu dan teknologi, seni dan budaya daerah semakin tertinggal dengan berbagai ragam masuknya kebudayaan asing. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan kembali seni dan budaya daerah Jambi maka Badan Kesbangpol Kota Jambi melakukan Kegiatan Dialog Seni dan Budaya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan tersebut diikuti oleh Guru Kesenian/Guru BK SMP, Guru Kesenian/Guru BK MTs, Seniman, Pengurus Sanggar Seni dan Pengurus Lembaga Adat. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga nilai seni dan budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuh kembangkan rasa cinta kepada kesenian dan kebudayaan daerah kepada generasi muda agar kesenian dan kebudayaan daerah tetap terjaga dan tidak semakin memudar.

Sasaran 4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah

Selama kegiatan berlangsung yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi selama tahun 2017, baik itu berupa sosialisasi peningkatan pendidikan politik bagi pemilih pemula di daerah Jambi maupun pemantauan situasi politik yang ada di daerah, dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan dari hasil pemantauan di lapangan tentang situasi politik cukup kondusif dan aman. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran antara lain:



I. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Pada tanggal 12 Desember 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi telah melaksanakan Pendidikan Poltik Bagi Pemilih Pemula yang berlangsung di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi yang diikuti 100 (seratus) orang peserta yang terdiri dari Siswa Sekolah Menengah Atas sederajat dan Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Jambi.

Sosialisasi dilaksanakan karena dipandang sangat perlu dilaksanakan guna menambah pengetahuan maupun wawasan terhadap para pemilih pemula karena pada Tahun 2018 kita akan dihadapkan pada Tahun Politik.

Dengan adanya Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula ini diharapkan dapat melahirkan sosok Pemilih-pemilih pemula yang cerdas.

II. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik

Untuk memantau Perkembangan Situasi Politik di bentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tahun 2017, ditetapkan dengan keputusan Walikota Jambi Nomor 104 Tahun 2017.Tim Pemantau Perkembangan Situasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memantau Perkembangan Politik Daerah Kota Jambi
- b. Menyiapkan laporan Pemantauan Perkembangan Politik

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik kepada Gubernur Provinsi Jambi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Jambi

Sepanjang Tahun 2017 Tim Perkembangan Situasi Politik Kota Jambi telah memantau beberapa isu Situasi Politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Memasuki Tahun Politik Tahun 2018 banyak sekali ditemukan isu-isu yang berkembang mengenai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang bakal muncul ditengah-tengah masyarakat.

III. Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik

Maksud dan tujuan kegiatan Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik dilaksanakan agar terlaksananya Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik serta meningkatnya tertib administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 1.1. Tim Verifikasi Pengajuan Penggunaan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Kota Jambi melaksanakan Verifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik pada tanggal 20 Juni 2017 Verifikasi Penelitian/pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sebanyak 12 partai politik.
- 1.2. Pokja Pembinaan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik melaksanakan rapat koordinasi dengan partai politik di Kota Jambi yang mendapat Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik pada

tanggal 30 Mei 2017 dalam rangka membahas tentang format permohonan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2017.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2017 untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.735.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.464.416.483,- atau 90,11%. Untuk mendukung Sasaran Kinerja Badan Kesbangpol Kota Jambi dengan 2 Program total anggarannya sebesar Rp. 1.707.794.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.460.152.050 Atau sebesar 85,50 % dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi %
I	Terselesaikannya masalah keagamaan					
II	Menurunnya angka konflik di masyarakat					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.487.098.500	1.248.277.800	83,94	90	6,06
III	Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif					
IV	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah					
	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	220.696.000	211.874.250	96	100	4
V	Administrasi Umum	1.027.205.500	1.004.264.433	97,76	100	2,24

Dari tabel diatas terlihat efisiensi setiap sasaran. Pada sasaran pertama capaian kinerja tidak mencapai 100 hal tersebut dikarenakan ada salah satu kegiatan yaitu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang belum sepenuhnya dapat terealisasi disebabkan oleh penyesuaian jadwal dari Kepala Daerah dan anggota FORKOMPIMDA. Hal lainnya disebabkan

oleh efisiensi penggunaan anggaran yang belum maksimal. Namun dari keseluruhan sasaran kegiatan telah mencapai capaian kinerja yang maksimal dan dinilai sangat efisien.

3.4. Hasil Review

Tabel Hasil Review

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017	%
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Nilai AKIP	Nilai	80	56	24	75	
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	0	100	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP tidak mencapai nilai yang ditargetkan, dalam penyusunannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi untuk semua kesempurnaan Laporan Kinerja pada Tahun berikutnya.

BAB IV**PENUTUP**

Pada Sasaran Pertama yaitu terselesaikannya masalah agama dengan capaian kinerja 100%, hampir setiap masalah yang terkait dengan keagamaan selalu dengan segera diselesaikan agar tidak berkembang kemana-mana. Sampai hari ini kebanyakan masalah keagamaan adalah yang berkaitan dengan rumah ibadah.

Untuk Sasaran Kedua yaitu menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis. Pada sasaran kedua ini tercapai 100% karena pada tahun 2017 tidak satupun masalah yang terkait dengan konflik, konflik apa saja baik yang disebabkan oleh suku, ras, dan antar golongan/etnis tidak ada sama sekali

Sasaran Ketiga yaitu meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif. Hanya tercapai 10,4 persen dari target kinerja 5%, Jumlah Ormas yang terdaftar cukup banyak dan yang mendaftar ulang setiap tahunnya masih relatif sedikit. Kemungkinan besar Ormas ada yang melaksanakan kegiatannya tapi tidak melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Kesbangpol Kota Jambi

Sasaran terakhir atau Sasaran Keempat yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah. Dapat dikatakan tercapai 100% kinerjanya, karena selama tahun 2017 situasi dan kondisi Kota Jambi sangatlah kondusif khususnya dilihat dari kondisi politik Kota Jambi.

Laporan Kinerja (LKj) 2017 semoga bisa bermanfaat khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Jambi. Supaya BKBP kedepan bisa



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

meningkatkan kinerjanya lagi, dengan kata lain LKj merupakan acuan untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pegawai setiap saat.

Jambi, Januari 2018
Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi

LIPHAN PASARIBU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590912 198001 1 001